

**DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERHADAP SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DAN ASET DESA DI DESA KUWIRAN, KECAMATAN
BANYUDONO, KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RAMADHAN TITO SINAR FATEKHAH
NIT. 22314029

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRACT

Toll road development is one of the infrastructure projects that affects land use change, the socio-economic conditions of communities, and village assets. This study aims to analyze the impacts of toll road development on land use change, community socio-economic conditions, and village assets in Kuwiran Village, Banyudono District, Boyolali Regency. This research employed a mixed methods approach, integrating quantitative, qualitative, and spatial-temporal analyses through satellite image interpretation and overlay techniques of land use maps from 2020 to 2025. Data were collected using PlanetScope satellite imagery (2020–2024), LASAC imagery (2025), field observations, interviews, document analysis, and questionnaires administered to 66 respondents. The results indicate that toll road development caused significant land use changes. Road areas increased from 11.14 ha to 17.67 ha, while paddy fields decreased from 126.86 ha to 103.45 ha. Shrubland and mixed gardens also expanded during the study period. Socially, the development had relatively minor impacts, as social interaction, social solidarity, social capital, and community participation remained stable. Economically, respondents experienced increased income, asset ownership, and savings, with the proportion of households having savings rising from 63.64% before land acquisition to 87.88% after receiving land acquisition compensation. These findings suggest that the economic benefits outweighed the losses because most respondents relinquished only part of their landholdings while retaining other productive land. Regarding village assets, toll road development reduced village treasury land, prompting the Kuwiran Village Government to provide replacement village treasury land to ensure the continuity of government functions and public services. Overall, toll road development has affected land use, socio-economic conditions, and village asset management.

Keywords: *toll road development, land use change, community socio-economic conditions, village assets, land acquisition.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Landasan Teori	17
C. Kerangka Pemikiran	21
D. Pertanyaan Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	24
D. Definisi Operasional Variabel.....	26
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	40

A. Kabupaten Boyolali	40
B. Kecamatan Banyudono.....	43
C. Desa Kuwiran	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Perubahan Penggunaan Lahan.....	53
B. Sosial Ekonomi Masyarakat	82
C. Aset Desa.....	123
BAB VI PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, menetapkan 226 Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek skala prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Untuk menjamin percepatan dan efektivitas pelaksanaannya, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 yang memberikan kemudahan dalam aspek perizinan, koordinasi, dan pembiayaan pembangunan guna memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu sektor utama PSN yaitu pembangunan infrastruktur transportasi khususnya jalan tol yang bertujuan memperkuat integrasi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah (Calderón & Servén, 2014). Jalan tol berperan penting sebagai tulang punggung sistem transportasi darat yang meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (Sasongko dkk., 2025). Keberadaan jalan tol juga secara makro berkontribusi terhadap peningkatan nilai lahan dan berkembangnya aktivitas ekonomi baru di sekitar wilayah jalan tol (Calderón & Servén, 2014). Oleh karena itu, dalam realisasi pembangunan jalan tol memerlukan ketersediaan lahan yang memadai serta pengaturan pemanfaatan ruang yang terencana agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan kebijakan pembangunan nasional (Pamungkas, 2021)

Pembangunan jalan tol tidak dapat dilepaskan dari proses pengadaan tanah, karena pengadaan tanah menjadi prasyarat utama dalam penyediaan lahan untuk kepentingan umum sebelum tahapan pembangunan dapat dilaksanakan secara

efektif dan berkelanjutan (Pamungkas, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah proses penyediaan tanah melalui mekanisme pelepasan hak secara adil dan transparan, termasuk pemberian ganti kerugian yang layak dan setimpal kepada pihak yang berhak. Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur tahapan inventarisasi, identifikasi, penilaian oleh appraisal, musyawarah, hingga pembayaran ganti kerugian. Keberhasilan pembangunan jalan tol ditentukan oleh efektivitas pengaturan dan implementasi pengadaan tanah, termasuk dalam aspek kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang meminimalkan hambatan sebelum tahap pembangunan dilaksanakan (Rahmadani, 2022).

Proses pengadaan tanah sering kali memicu perubahan penggunaan lahan (Anisa dkk., 2021). Hal ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan (Utomo, 2025). Perubahan penggunaan lahan berpotensi memiliki dampak terhadap keberlanjutan lahan produktif, terutama melalui berkurangnya luas lahan pertanian dan menurunnya fungsi ekologis wilayah akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali (Putri dkk., 2024). Selain itu, perubahan penggunaan lahan juga cenderung berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat (Lambin & Meyfroidt, 2011).

Dalam aspek sosial, kajian Sakmawati & Firmansyah (2025) menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan berdampak pada pola interaksi antarmasyarakat, di mana kegiatan sosial menjadi lebih terbatas dan hubungan antarmasyarakat cenderung menurun akibat perubahan struktur ruang dan mobilitas. Menurut Rusmawan (2017) perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian juga berpotensi memperlemah kohesi sosial di komunitas agraris karena pergeseran mata pencaharian dan berkurangnya nilai-nilai budaya yang melekat pada aktivitas bertani. Sejalan dengan itu, Riptanti dkk. (2024) juga berpendapat pembangunan infrastruktur berskala besar sering kali mengurangi ruang interaksi sosial dan melemahkan rasa kebersamaan antarmasyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam

kegiatan sosial kemasyarakatan serta meningkatkan kerentanan sosial di wilayah terdampak pembangunan (Sulaisiyah dkk., 2022).

Dalam aspek ekonomi, Kajian yang dilakukan Nurhayati & Putra (2024) menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan sering kali menggeser struktur mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris ke sektor informal yang lebih rentan secara ekonomi. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Nangoi dkk. (2025) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian mengurangi lahan produktif, menurunkan pendapatan petani dan pemilik lahan, serta mendorong mereka beralih ke sektor non-pertanian dengan penghasilan yang cenderung tidak stabil. Perubahan struktur mata pencaharian tersebut pada akhirnya meningkatkan kerentanan keuangan rumah tangga, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan keterampilan dan akses terhadap peluang kerja (Berliana & Sihalo, 2023). Selain itu, kajian yang dilakukan Murti & Kurniawan, (2025) menyampaikan bahwa ketidakstabilan pendapatan pasca-alih fungsi lahan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal serta memperlemah ketahanan ekonomi desa dalam jangka panjang.

Di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang mencakup gerbang exit tol membawa konsekuensi terhadap keberadaan sejumlah aset desa yang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam mempertahankan fungsi pelayanan publik dan pengelolaan aset yang produktif. Selain itu, penyediaan tanah dan pembangunan kembali aset desa yang terdampak memerlukan proses yang kompleks karena harus memperhatikan ketersediaan lahan, aspek administratif, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompleksitas tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat apabila tidak diimbangi dengan langkah-langkah penanganan yang tepat.

Secara normatif, pengadaan tanah yang terkena bangunan atau fasilitas yang termasuk aset desa seharusnya dilaksanakan dengan tetap menjamin keberlanjutan fungsi aset desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa dan ketentuan pengelolaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga pemindah tanganan aset desa, termasuk mekanisme tukar-menukar tanah desa yang digunakan untuk kepentingan umum. Ketentuan ini menegaskan bahwa harus tersedia tanah pengganti yang setara nilai dan manfaatnya guna menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan publik desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian terkait analisis dampak pengadaan tanah jalan tol di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali perlu dilakukan untuk mengevaluasi secara komprehensif terhadap sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan aset desa. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme ganti kerugian dan penyediaan tanah pengganti, dalam praktiknya perubahan struktur mata pencaharian, ketidakstabilan pendapatan, serta pergeseran pola interaksi sosial masyarakat sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan teknis pengadaan tanah. Pada saat yang sama, terdampaknya aset fisik desa akibat proyek pembangunan berpotensi menurunkan kapasitas pelayanan publik dan menghambat pembangunan perdesaan dalam jangka pendek.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap perubahan penggunaan lahan di Desa Kuwiran?
2. Bagaimana dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Kuwiran?
3. Bagaimana dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap aset desa dan upaya Pemerintah Desa Kuwiran dalam penyediaan tanah untuk pembangunan kembali aset desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap perubahan penggunaan lahan di Desa Kuwiran.

2. Menganalisis dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Kuwiran.
3. Mengetahui dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap aset desa dan upaya Pemerintah Desa Kuwiran dalam penyediaan tanah untuk pembangunan kembali aset desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis (Akademik)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam kajian pembangunan wilayah, tata ruang, dan pengelolaan aset desa, serta memperkaya literatur mengenai dampak pembangunan infrastruktur jalan tol pada tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis (Aplikatif)

- a. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang lebih berkelanjutan.
- b. Bagi Pemerintah Desa, sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan perlindungan aset desa serta perencanaan pembangunan pasca pengadaan tanah pembangunan jalan tol.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai sumber informasi mengenai dampak pengadaan tanah pembangunan jalan tol terhadap kondisi sosial ekonomi dan aset desa.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian sejenis di wilayah lain.

E. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang berlokasi di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.
2. Penelitian ini menjadikan masyarakat yang terdampak langsung pengadaan tanah dan pemerintah Desa Kuwiran sebagai subjek penelitian.
3. Penelitian ini menganalisis perubahan penggunaan lahan di Desa Kuwiran tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 berdasarkan data spasial.

4. Penelitian ini mengkaji aspek kondisi sosial masyarakat (meliputi interaksi sosial, solidaritas sosial, modal sosial, dan partisipasi) serta aspek ekonomi masyarakat (meliputi perubahan mata pencaharian, tingkat pendapatan, kepemilikan aset, dan struktur ekonomi rumah tangga).
5. Penelitian hanya membahas terkait dampak aset desa yang meliputi kondisi fisik dan administratif aset desa serta upaya Pemerintah Desa Kuwiran dalam penyediaan tanah untuk pembangunan kembali aset desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pembangunan jalan tol terhadap perubahan penggunaan lahan, sosial ekonomi masyarakat, dan aset desa di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pembangunan jalan tol menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan di Desa Kuwiran selama periode 2020–2025. Perubahan terbesar terjadi pada lahan pertanian yang beralih menjadi kawasan jalan tol, lahan terbuka, serta penggunaan non-pertanian lainnya. Proses pengadaan tanah, pembersihan lahan, dan pembangunan fisik jalan tol menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan tersebut. Perubahan penggunaan lahan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh langsung terhadap struktur ruang wilayah, terutama melalui berkurangnya luas lahan pertanian produktif.
2. Pembangunan jalan tol memberikan dampak yang berbeda terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Pada aspek sosial, interaksi sosial, solidaritas sosial, modal sosial, dan partisipasi masyarakat relatif tetap terjaga meskipun sebagian masyarakat mengalami kehilangan lahan dan perpindahan tempat tinggal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kuwiran masih mampu mempertahankan hubungan sosial melalui kegiatan kemasyarakatan, gotong royong, dan aktivitas sosial lainnya. Sebaliknya, pada aspek ekonomi terjadi perubahan yang lebih nyata berupa pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian menuju sektor non-pertanian, meningkatnya pendapatan sebagian masyarakat, bertambahnya kepemilikan aset dan tabungan, berkurangnya kepemilikan hutang, serta munculnya peluang usaha baru setelah masyarakat menerima Uang Ganti Rugi (UGR). Dengan demikian, pembangunan jalan tol tidak hanya menimbulkan perubahan struktur ekonomi masyarakat, tetapi juga

membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang mampu memanfaatkan kompensasi secara produktif.

3. Pembangunan jalan tol berdampak terhadap berkurangnya aset desa, khususnya tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pembangunan jalan tol. Pemerintah Desa Kuwiran telah melakukan upaya penyediaan tanah kas desa pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga fungsi aset desa secara umum tetap dapat dipertahankan. Meskipun demikian, proses penyediaan tanah pengganti masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan ketersediaan lahan, penyesuaian nilai tanah, serta proses administrasi yang cukup panjang. Namun, melalui koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait, pengelolaan aset desa tetap dapat dilaksanakan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami gangguan yang berarti.

Secara keseluruhan, pembangunan jalan tol di Desa Kuwiran memberikan konsekuensi berupa transformasi penggunaan lahan, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta penyesuaian pengelolaan aset desa. Meskipun menimbulkan pengurangan lahan pertanian dan aset desa, pembangunan ini juga memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan peluang usaha dan kesejahteraan sebagian masyarakat, sementara kondisi sosial masyarakat tetap relatif stabil karena didukung oleh modal sosial dan solidaritas yang masih kuat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi pelaksana pengadaan tanah, perlu meningkatkan pendampingan kepada masyarakat terdampak setelah pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR), terutama melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan keterampilan kerja, dan pengelolaan keuangan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memanfaatkan dana kompensasi secara produktif sehingga manfaat ekonomi pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

2. Bagi Pemerintah Desa Kuwiran, perlu terus mengoptimalkan pengelolaan tanah kas desa pengganti agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Selain itu, administrasi aset desa perlu terus diperbarui secara berkala agar tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi masyarakat terdampak, diharapkan dapat memanfaatkan Uang Ganti Rugi tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga sebagai modal investasi maupun pengembangan usaha produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Masyarakat juga diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan sebagai modal sosial dalam menghadapi perubahan akibat pembangunan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai dampak pembangunan infrastruktur dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau melakukan kajian longitudinal mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat beberapa tahun setelah pembangunan jalan tol beroperasi. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas pemanfaatan Uang Ganti Rugi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun keberlanjutan pengelolaan aset desa dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan aspek perubahan penggunaan lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan aset desa secara terpadu, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S. D., & Hadibasyir, H. Z. Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun 2022–2042 di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Program Studi Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Anggraeni, F., Delani, S., & Dwinata, I. F. (2023). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Gunungpati, Semarang Periode Tahun 2002, 2012, dan 2022. *Jurnal Sains Geografi*, 1(2), 20–29.
- Anggraeni, F. N., Mataburu, I. B., & Setianingsih, A. I. (2025). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2014–2024 terhadap RTRW Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Media Komunikasi Geografi*, 26(2), 200–218. <https://doi.org/10.23887/mkg.v26i2.100512>
- Anisa, K., Prasetyo, P. K., Pujiriyani, D. W. (2021). Dampak pengadaan tanah jalan tol Trans Sumatera pada kondisi penghidupan masyarakat yang berhak. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.154>
- Arieska, P. K., & Herdiani, N. (2018). Pemilihan teknik sampling berdasarkan perhitungan efisiensi relatif. *Statistika: Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang*, 6(2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. (2025). *Kabupaten Boyolali dalam angka 2025*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. (2025). *Kecamatan Banyudono dalam angka 2025*.
- Berliana, A. S., & Sihalohe, M. (2023). Analisis Perubahan Struktur Agraria dan Pengaruhnya terhadap Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 7(1), 149–164. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v7i1.1057>

- Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing Likert Data. *Journal of Extension*, 50(2), 1–5.
- Calderón, C., & Servén, L. (2014). Infrastructure, Growth, and Inequality an Overview. <http://econ.worldbank.org>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Chowdhury, M. R., Sourav, M. S. U., & Sulaiman, R. B. (2023). *The role of digital agriculture in transforming rural areas into smart villages*. <https://arxiv.org/pdf/2301.10012.pdf>
- Chrisnawati, R. A., Kistiyah, S., & Prasetyo, P. K. (2018). Pemberian ganti kerugian tanah kas desa untuk Jalan Tol Solo – Mantingan II: Problematika pelaksanaannya. *Tunas Agraria*, 1(1).
- Congalton, R. G., & Green, K. (2009). *Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data: Principles and practices* (2nd ed.). CRC Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Danoedoro, P. (2012). *Pengantar Penginderaan Jauh Digital*. ANDI.
- Department for International Development. (1999). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. London: DFID.
- Dewi, A. S., Sitorus, S. R., & Makalew, A. D. (2024). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Ruang Terbuka Hijau serta Arahannya di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Tataloka*, 26(2), 77–88. <https://doi.org/10.14710/tataloka.26.2.77-88>
- Durkheim, É. (1893). *De la division du travail social*. Paris: Félix Alcan.

- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fadila, F., Safriani, Eliana, & Khaddafi, M. (2025). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Furidha, B. W. (2024). Comprehension of the descriptive qualitative research method: A critical assessment of the literature. *Journal of Multidisciplinary Research*, 1–8. <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>
- Gea, A. H. D., Hulu, F., Telaumbauna, E., & Mendrofa, S. A. (2024). Analisis mekanisme seleksi perangkat desa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Gumelar, G. M., Wafirotn, K. Z., & Wijayanti, I. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/7879>
- Gunadi, S. P., Syartinilia, & Pravitasari, A. E. (2025). Analisis perubahan ruang terbuka hijau dengan citra resolusi tinggi di Kota Depok. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 9(1), 14–28. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2025.9.1.14-28>
- Hapsari, R. T., Prasetyo, P. K., & Imbiri, A. (2025). Mekanisme pengadaan tanah skala kecil tanpa penetapan lokasi pasca pembangunan saluran pengalihan alur sungai. *Jurnal Pertanahan*, 15(2), 158–177. <https://doi.org/10.53686/jp.v15i2.302>
- Hermawan, R., Rusydi, A. N., & Akbar, M. A. (2025). Analisis Geospasial Perubahan Penggunaan Lahan Sawah di Kota Malang Menggunakan Google Earth Engine (Vol. 9, Issue 2). <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Jensen, J. R. (2015). *Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective*.

- Juncedi, M. B., & Hamidi, W. (2023). Dampak pembangunan jalan tol Pekanbaru–Dumai terhadap sosial ekonomi masyarakat. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 4(2). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. Chicago: ACTA Publications.
- Krisdanawiyah, B., & Sigit, A. A. (2022). Analisis spasial perubahan penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian tahun 2013–2022 di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lakshmanan, T. R. (2011). The broader economic consequences of transport infrastructure investments. *Journal of Transport Geography*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/J.JTRANGE.2010.01.001>
- Lambin, E. F., & Meyfroidt, P. (2011). Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. *PNAS*, 108(9), 3465–3472. <https://doi.org/10.1073/pnas.1100480108>
- Lambin, E. F., Turner II, B. L., Geist, H. J., et al. (2001). *The Causes of Land-Use and Land-Cover Change: Moving Beyond the Myths*. *Global Environmental Change*, 11(4), 261–269.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). Strategi memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45315–45328. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/21803>
- Majdina, N., Pratikno, B., & Tripena, A. (2024). Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Bernoulli dan Slovin. *Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika*, 16(1), 73–84. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Moser, C. O. N. (1998). The asset vulnerability framework: Reassessing urban poverty reduction strategies. *World Development*, 26(1), 1–19. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)10015-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)10015-8)
- Mulya, Q. P., Aliyah, I., & Yudana, G. (2022). Perubahan penggunaan lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. *Region*, 17(2), 237. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.38660>
- Naeruz, M., Damayanti, A., & Tanjung, M. (2022). Analisis dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terhadap pendapatan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 527–532. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.2941>
- Nangoi, T. R. R., Laoh, E. O. H., & Baroleh, J. (2021). Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan petani. *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan*, 3(4), 401–408. <https://doi.org/10.35791/agrirud.v3i3.37102>
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, N., & Putra, I. M. (2024). Transforming Agricultural Land into Residential Areas: A Socio-Economic Study in Tamiang Subdistrict, Mandailing Natal Regency. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 220–228. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i2.37176>
- Pamungkas, G. B. (2021). The land acquisition of inundated land for the toll road project. *IJPD*, 6(2), 48–55. <https://doi.org/10.14710/ijpd.6.2.48-55>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putri, D. K., & Hariyanto, B. (2018). Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Swara Bhumi*, 5(6)
- Putri, I. D., Martanto, R., & Junarto, R. (2024). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman. *Widya Bhumi*, 4(2), 192–211. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i2.108>
- Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis

Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>

Riptanti, E. W., Raharjo, Z. H., & Khairiyakh, R. (2024). Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi petani (studi kasus pembangunan jalan tol Surakarta–Yogyakarta di Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 8(2), 771–784.

Rusmawan, R. (2017). Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian ke Non-Pertanian Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Geomedia Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 5(1). <https://doi.org/10.21831/gm.v5i1.14207>

Saraswati, L. A., Salim, N., Imbiri, A., & Junarto, R. (2024). Tanah yang hilang: Drama panjang penggantian tanah desa pasca pengadaan tanah YIA. Yogyakarta: Deepublish.

Siallagan, C. S. J., Marbun, S. F., & Damanik, M. R. S. (2025). Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Kutepat terhadap Aktivitas Ekonomi dan Interaksi Sosial Masyarakat di Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 32410–32414. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/32618>

Simmel, G. (1908). *Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*. Leipzig: Duncker & Humblot.

Singgalen, Y. A. (2023). *Penerapan metode spatio-temporal analysis dalam analisis dinamika tutupan dan penggunaan lahan berbasis NDVI dan NDWI*. KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer, 4(2), 1–13.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Ed. 27). Alfabeta.

Suharsaputra, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Rajagrafindo Persada.

Sulaisiyah, Nasdian, F. T., & Barlan, Z. A. (2022). *Hubungan perubahan sosial pasca pembangunan infrastruktur Jembatan Suramadu dengan taraf hidup masyarakat pedesaan*. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan*

Masyarakat (JSKPM), 5(6), 880–894.
<https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i06..923>

Sutanto, R. (1999). Interpretasi citra penginderaan jauh.

Sutedi, A. (2019). Implementasi prinsip kepentingan umum dalam pengadaan tanah. Sinar Grafika.

Suyanto, & Mairini, E. (2021). Ganti rugi tanah pengganti tanah kas desa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: Ganti rugi, tanah kas desa, belum didapatkan tanah pengganti. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(1), 1–5.
<https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1429>

Tarigan, K. E. R., & Sihalohe, M. (2022). Pengaruh konversi lahan pertanian terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 6(5), 623–635.
<https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i5.1058>

Tiyas, S. P., & Sadali, M. I. (2025). *Analisis dampak pembangunan Jalan Tol Semarang–Solo terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali* (Skripsi). Universitas Gadjah Mada.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). New York: Pearson Education.

Uin, A. R., & Banjarmasin, A. (2018). Analisis data kualitatif.

Utami, W., Kuna, A., & Marini, M. (2023). Dampak Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(1), 105–117.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v19i1.37429>

Utomo, D., L. (2025). Kajian Dampak Sosial Pengadaan Tanah Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Bandara Bali Utara. Institut Pertanian Bogor (IPB). <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/161594>

Wang, J., Li, Y., Wang, Q., & Cheong, K. C. (2019). Urban-rural construction land replacement for more sustainable land use and regional development in China: Policies and practices. *Land*, 8(11).
<https://doi.org/10.3390/land8110171>

Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., & Sutarni, N. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo). *Jurnal Bedah Hukum*, 5(2), 202–221. <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i2.661>

Zalmita, N., Alvira, Y., & Furqan, M. H. (2020). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2004-2019. *Jurnal geografi*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24036/geografi/vol9-iss1/920>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Nomor 7 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.

Peraturan Desa Kuwiran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang Digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo 1 dan Yogyakarta Bawen 1.